

**PROPOSAL**  
**RENCANA KEGIATAN TIM MANAJEMEN**  
**(RKTM)**

**MANAJEMEN SATKER**



**ABDUL AZIS**



**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) ACEH**  
**BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**2018**

## LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul RKTМ : Manajemen Satker
2. Unit Kerja : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh
3. Alamat Unit Kerja : Jl. T. Nyak Makam No. 27 Lampinenung Banda Aceh
4. Sumber Dana : DIPА BPTP Aceh TA. 2018
5. Penanggung Jawab RKTМ
  - a. Nama : Abdul Azis, S.Pi, M.Si
  - b. Pangkat/Golongan : Penata Tk.I / III d
  - c. Jabatan : Peneliti Madya / KSPР
6. Jangka Waktu : Satu (1) tahun
7. Biaya : Rp. 156.400.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Empat Ratus Ribu Rupiah)

Koordinator Program,

Penanggung Jawab

Dr. Rachman Jaya  
NIP. 19740503 200003 1 001

Abdul Azis, S.Pi, M.Si  
NIP. 19663112 199203 1 001

Mengetahui,  
Kepala BBP2TP

Menyetujui,  
Kepala BPTP

Dr. Haris Syahbuddin, DEA  
NIP.19680415 1999202 1 001

Ir. M. Ferizal, M.Sc.  
NIP. 19650219 199203 1 002

## **RINGKASAN**

- 1 Judul RKTМ : Manajemen Satker
- 2 Unit Kerja : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh
- 3 Lokasi : BPTP Aceh
- 4 Agroekosistem : -
- 5 Status (L/B) : Lanjutan
- 6 Tujuan :
  - Mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kerja/teknis/program tahunan Balai.
  - Mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran pengkajian/diseminasi dari masing-masing penanggung jawab.
- 7 Keluaran :
  - 1 (satu) dokumen rencana kerja/teknis/program tahunan Balai
  - 1 (satu) dokumen rencana anggaran pengkajian/diseminasi
- 8 Hasil Melalui kegiatan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran yang terstruktur dan sejalan alur perencanaan di lingkup Balitangtan selama setahun, maka akan diperoleh suatu dokumen perencanaan yang akurat dan operasional sesuai kondisi wilayah Aceh.
- 9 Prakiraan Manfaat : Dengan penyusunan program dan perencanaan yang akurat yang mengacu pada alur perencanaan di lingkup Badan Litbang Pertanian, maka dapat memberikan dukungan pada tugas dan fungsi BPTP Aceh dalam menghasilkan inovasi teknologi spesifik lokasi di wilayah Aceh.
- 10 Prakiraan Dampak : Dampak yang diperoleh melalui penyusunan program dan rencana kerja yang akurat adalah meningkatkan kinerja Balitbangtan khususnya BPTP Aceh dan memberikan kontribusi positif terhadap capaian keberhasilan program lingkup Kementerian Pertanian.
- 11 Prosedur : Mekanisme perencanaan dan program lingkup Badan Litbang Pertanian mengacu pada dan mekanisme penyusunan, evaluasi dan persetujuan proposal mengacu pada Permentan Nomor: 44/OT.140/8/2011. Penyusunan program/kegiatan BPTP Aceh dikoordinasikan dengan instansi vertikal (secara hirarkis) dan dinas/instansi lingkup pertanian kabupaten/kota dan provinsi Aceh. Penyusunan anggaran pengkajian/diseminasi dikoordinasikan dengan bidang program BBP2TP dan penanggung jawab kegiatan di BPTP Aceh. Usulan kegiatan dari BPTP Aceh akan dibahas oleh tim evaluator di BBP2TP dan hasil evaluasi dijadikan sebagai masukan bagi penanggung jawab kegiatan untuk perbaikan proposal kegiatan.
- 12 Jangka Waktu : satu (1) tahun
- 13 Biaya : Rp. 1.550.000.000,-

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berkenaan dengan kebijakan pemerintahan baru dengan Kabinet Kerja, yang diwarnai dengan gaya sederhana namun kecepatan tinggi, maka Balitbangtan sebagai "bagian" dari birokrasi nasional dituntut melakukan **sinergi, harmoni, dan simplikasi** dalam mereorientasi kebijakan program ke depan. Reorientasi kebijakan litbang pertanian juga harus mencermati dinamika *global, regional, dan national agricultural research outlook*. Sehubungan dengan itu, Balitbangtan akan "kerja" mengimplementasikan program dan kegiatan litbang yang "**back to basic**" secara sistematis, efektif, dan dilandasi spirit manajemen korporasi Balitbangtan, dan *tagline Science, Innovations, Networks* (Balitbangtan, 2015). Kegiatan litbang pertanian harus tetap memperhatikan orientasi jangka panjang, disamping refocusing jangka pendek yang saat ini tertuju pada swasembada pangan dan komoditas strategis lainnya. Oleh karena itu kegiatan litbang pertanian yang tidak terkait langsung dengan swasembada pangan tetap perlu menjadi perhatian UK/UPT lingkup Balitbangtan. Hal ini dibuktikan dengan pengalokasian anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan non swasembada di lingkup Balitbangtan.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian No 16/Permentan/OT.140/3/2006 tanggal 1 Maret 2006 bahwa Balai Pengkajian Teknologi Pertanian merupakan unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian (KPP) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, dan evaluasi serta laporan, dan penyiapan bahan kerjasama, informasi, dokumentasi dan penyebarluasan dan pendayagunaan hasil serta pelayanan sarana pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Seksi KSPP dalam mempersiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja/teknis/program balai yang bekerjasama dengan tim program yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian.

Penyusunan rencana program Balai dilakukan melalui koordinasi secara vertikal dengan bidang program di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) dan secara lintas sektoral dengan Dinas/instansi terkait di daerah, seperti forum pertemuan Musawarah Rencana Pembangunan Pertanian/Daerah (Musrenbangtan/Musrenbangda) dan pertemuan Tim Komisi Teknologi Pertanian.

Berdasarkan hasil Raker Balitbangtan tahun 2015, maka alur mekanisme perencanaan dan program lingkup Badan Litbang Pertanian mengacu Permentan Nomor: 44/OT.140/8/2011, baik dalam penyusunan, evaluasi dan persetujuan proposal. Perencanaan di tingkat balai dilakukan dimulai usulan dari para pengkaji dilanjutkan pembahasan di tingkat kelji, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk matriks usulan kegiatan. Selanjutnya matriks usulan kegiatan dievaluasi di tingkat Balai Besar dan menjadi bahan evaluasi di bagian perencanaan Badan Litbang Pertanian. Matriks usulan kegiatan yang sudah melewati proses evaluasi oleh tim evaluator di BB Pengkajian dan Badan Litbang akan menjadi dasar dalam penyusunan proposal kegiatan pengkajian di tingkat Balai. Selain itu, proses perencanaan di tingkat balai juga merespon program strategis dari Kementan, seperti program pendampingan kawasan, UPSUS swasembada pangan, Pembangunan Taman Teknologi Pertanian dan Bio-industri yang selanjutnya menjadi kegiatan pendampingan di tingkat provinsi ataupun kab/kota.

## **1.2. Dasar Pertimbangan**

Era pembangunan yang semakin kompetitif menuntut peran Balitbangtan dalam pembangunan pertanian (*impact recognition*) dan peningkatan nilai ilmiah (*scintific recognition*) dalam pencapaian status sebagai lembaga penelitian yang berkelas dunia. Mencermati tuntutan tersebut, perlu reorientasi paradigma pembangunan pertanian menuju "Penelitian untuk pembangunan" (*research for development*). Dengan paradigma ini, orientasi kerja Balitbangtan adalah menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan sistem kelembagaan pertanian untuk diterapkan sebagai mesin penggerak pembangunan pertanian. Untuk itu, kegiatan penelitian dan pembangunan harus berorientasi kepada kebutuhan pengguna (*user oriented*) tanpa mengabaikan pengembangan teknologi yang bersifat demand driving, sehingga ilmu pengetahuan, teknologi dan sistem

kelembagaan pertanian yang dihasilkan lebih tepat guna (spesifik lokasi) dan futuristik.

Dalam paradigma penelitian untuk pembangunan peranan perencanaan penelitian dan pengembangan sangat strategis mendukung pencapaian sasaran Balitbangtan, meliputi: (a) terciptanya varietas unggul dan galur (benih dan bibit) dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas mendukung pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; (b) terciptanya inovasi teknologi produksi dan pengelolaan sumberdaya pertanian mendukung pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; (c) terciptanya inovasi teknologi pascapanen hasil pertanian berbasis sumberdaya lokal mendukung diversifikasi pangan dan peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, (d) tersedianya kebijakan pengembangan kelembagaan agribisnis dan agroindustri untuk peningkatan kesejahteraan petani, (e) meningkatnya sistem diseminasi, promosi dan diseminasi inovasi teknologi pertanian, serta jejaring kerjasama nasional dan internasional; dan (f) meningkatnya jumlah publikasi di jurnal nasional dan internasional, hak kekayaan intelektual (HKI) dan komersialisasi hasil penelitian.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka Balitbangtan berupaya melakukan reformasi perencanaan dan penganggaran dan kegiatan dalam kerangka *performance base budgeting*.

### **1.3. Tujuan**

#### **A. Tujuan Tahun 2017**

- Mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kerja/teknis/ program tahunan Balai.
- Mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran pengkajian/diseminasi dari masing-masing penanggung jawab.

#### **B. Tujuan Jangka Panjang**

Melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran yang mendukung tugas dan fungsi balai dalam menghasilkan teknologi tepat guna spesifik lokasi di Sultra.

## **1.4. Keluaran**

### **A. Keluaran Tahun 2017**

- Terkumpulnya bahan dan terlaksananya koordinasi dalam penyusunan program dan rencana kerja/teknis/ program tahunan Balai;
- Terkumpulnya bahan dan terlaksananya koordinasi dalam penyusunan rencana anggaran pengkajian/diseminasi dari masing-masing penanggung jawab.

### **B. Keluaran Jangka Panjang**

Berjalannya kegiatan penyusunan rencana kerja dan anggaran yang mendukung tugas dan fungsi balai dalam menghasilkan teknologi tepat guna spesifik lokasi di Provinsi Aceh.

## **1.5. Perkiraan Manfaat dan Dampak**

Dengan penyusunan program dan perencanaan yang akurat yang mengacu pada alur perencanaan di lingkup Badan Litbang Pertanian, maka dapat memberikan dukungan pada tugas dan fungsi BPTP Aceh dalam menghasilkan inovasi teknologi spesifik lokasi di wilayah Sultra.

Dampak yang diperoleh melalui penyusunan program dan rencana kerja yang akurat adalah meningkatkan kinerja Balitbangtan khususnya BPTP Aceh dan memberikan kontribusi positif terhadap capaian keberhasilan program lingkup Kementerian Pertanian.

## **II. PROSEDUR**

### **2.1. Pendekatan dan Kerangka Pikir**

Perencanaan penelitian dan pengembangan pertanian secara umum mengacu pada program pembangunan pertanian nasional dan kebutuhan *stakeholder* (pemangku kepentingan). Penelitian dan pengembangan pertanian berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kementerian Pertanian, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Renstra Balitbangtan. Program penelitian dan pengembangan pertanian tahunan ditetapkan dengan mengacu pada: (a) kebijakan pembangunan nasional dan Kementerian Pertanian, (b) Renstra Balitbangtan dan Renstra masing-masing UK/UPT lingkup Balitbangtan, (c) kebutuhan pemangku kepentingan yang diperoleh melalui mekanisme

penjaringan umpan balik, serta (d) kebutuhan mendesak dalam bidang pertanian atau kebutuhan yang bersifat antisipatif dan responsif terhadap isu-isu aktual dan strategis.

Kegiatan penelitian dan pengembangan di Balitbangtan merupakan rangkaian kegiatan terstruktur yang mengacu pada alur penyiapan inovasi inovasi teknologi pertanian sesuai dengan Permentan Nomor 03/Kpts/OT.060/1/2005 tentang pedoman penyiapan dan penerapan teknologi pertanian. Dalam Permentan tersebut telah diatur penciptaan inovasi yang dilakukan di UK/UPT. Keterkaitan antara tahapan satu dengan tahapan berikutnya adalah sebagai berikut: tahapan penelitian, tahapan verifikasi dan tahapan pengkajian serta tahapan diseminasi

## **2.2. Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program meliputi pengumpulan bahan dan koordinasi kegiatan secara vertikal (hirarkis) melalui bidang program BBP2TP, dan koordinasi lintas sektoral melalui forum pertemuan Musrenbangtan tingkat kabupaten/kota dan provinsi, Musrenbangda tingkat provinsi, dan Tim Komisi Teknologi Pertanian. Bahan usulan kegiatan dan anggaran pengkajian/diseminasi dikumpulkan dari penanggungjawab, yaitu dalam bentuk Matrik Program, RPTP, RDHP dan RAB. Rencana pengkajian dan diseminasi tersebut dibahas secara berjenjang mulai dari tingkat Balai, BBP2TP, sampai dengan Balitbangtan.

## **2.3. Bahan dan Prosedur Pelaksanaan**

### **A. Lokasi dan Waktu**

Kegiatan perencanaan dilaksanakan di Provinsi Aceh dan di luar wilayah Provinsi Aceh. Waktu pelaksanaan direncanakan mulai bulan Januari hingga Desember 2017.

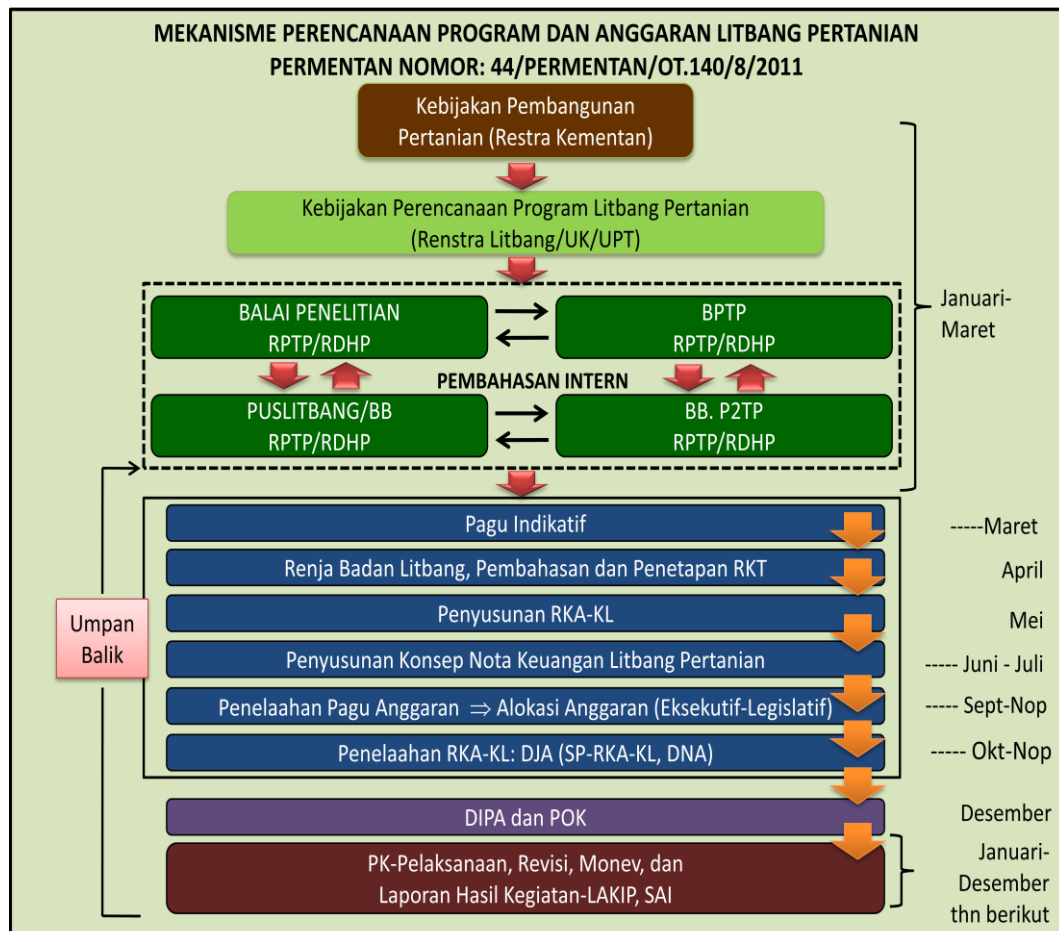
### **B. Bahan dan Alat**

Bahan dan alat yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan perencanaan antara lain komputer, printer, CD-RW, flash disk, kertas, refill tinta, buku statistik dan lainnya.

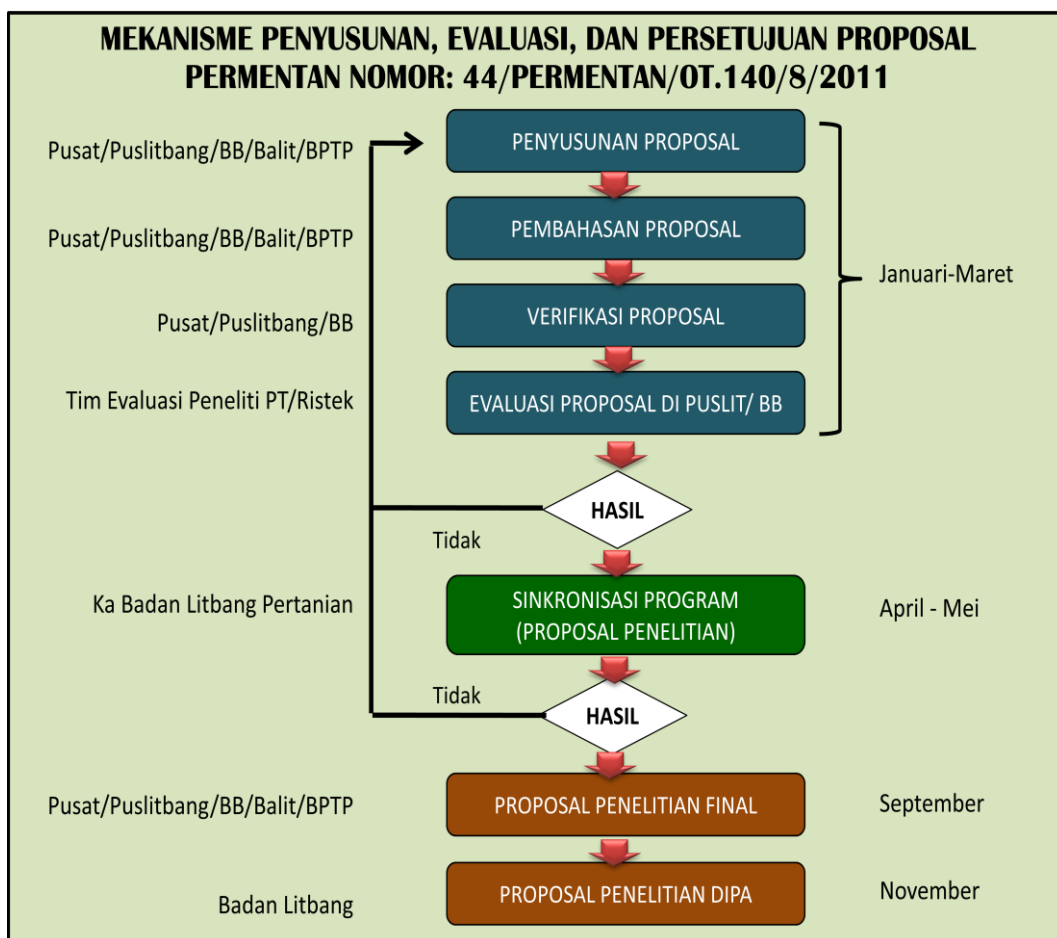


### C. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

Mekanisme perencanaan dan program lingkup Badan Litbang Pertanian mengacu pada dan mekanisme penyusunan, evaluasi dan persetujuan proposal mengacu pada Permentan Nomor: 44/OT.140/8/2011 (Gambar 1) dan (Gambar 2). Penyusunan program/kegiatan BPTP Sultra dikoordinasikan dengan instansi vertikal (secara hirarkis) dan Dinas/instansi lingkup pertanian kabupaten/kota dan provinsi Aceh. Penyusunan anggaran pengkajian/diseminasi dikoordinasikan dengan bidang program BBP2TP dan penanggung jawab RPTP/RDHP BPTP Aceh. Usulan kegiatan dari BPTP Aceh akan dibahas oleh tim evaluator di BBP2TP dan hasil evaluasi dijadikan sebagai masukan bagi penanggung jawab kegiatan untuk perbaikan proposal kegiatan.



Gambar 1. Mekanisme perencanaan dan program mengacu pada Permentan Nomor: 44/OT.140/8/2011



Gambar 2. Mekanisme penyusunan, evaluasi dan persetujuan proposal mengacu pada Permentan Nomor: 44/OT.140/8/2011

### III. Analisis Risiko

#### 3.1 Daftar Risiko

No.	Risiko	Penyebab	Dampak
1.	Perencanaan tidak akurat	Data dukung dan informasi yang tidak akurat lengkap dari stakeholder dan mitra lainnya.	Penyusunan proposal kegiatan yang tidak sesuai kebutuhan pengguna.
		Pengolahan data base kebutuhan teknologi yang tidak akurat.	Tim program tidak dapat menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran secara tepat.

#### 3.2. Daftar Penanganan Risiko

No.	Risiko	Penyebab	Penanganan Risiko
1.	Perencanaan tidak akurat	Data dukung dan informasi yang tidak akurat lengkap dari stakeholder dan mitra lainnya.	Survey langsung ke Kabupaten/Kota terkait data dan informasi dari stakeholder dan mitra lainnya sehingga bisa diformulasikan sebagai kebutuhan teknologi spesifik lokasi.
		Pengolahan data base kebutuhan teknologi yang tidak akurat.	Pembinaan dari tim pusat secara berkala dan juga dukungan yang kuat dari pimpinan unit kerja dalam peningkatan keterampilan tim program.

#### IV. TENAGA DAN ORGANISASI PELAKSANAAN

##### 4.1. Tenaga yang terlibat dalam Pelaksanaan

No	Nama	Jabatan dalam kegiatan	Uraian tugas	Alokasi waktu (jam / minggu)
1	Abdul Azis, S.Pi, M.Si	KSP	Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran	20
2	Dr. Rachman Jaya, S.Pi., M.Si	Koordinator Program	Menyusun perencanaan program	10
3	Ir. Nurbaiti, M.Si	Pelaksana kegiatan	Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran	10
4	Zuardi Efendi, SP.	Pelaksana kegiatan	Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kegiatan	10
5	Husaini, S.P	Pelaksana Kegiatan	Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kegiatan	10
6	Eka Fitria, S.P	Pelaksana kegiatan	Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kegiatan	10
7	Cut Hilda, S.P	Pelaksana kegiatan	Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kegiatan	10
8	Asis	Pelaksana kegiatan	Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kegiatan	10
9	Rosdewani, SE	Pelaksana kegiatan	Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kegiatan	5
10	Irvandra Fatmal, S.P	Pelaksana kegiatan	Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kegiatan	5

## 4.2. Jangka Waktu Kegiatan

Kegiatan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Persiapan:												
• Pengumpulan pustaka	x	x										
• Penyusunan RKT	x	x										
2 Pelaksanaan kegiatan:			x	x	x	x	X	x	x	x		x
3 Pengolahan data dan informasi			x	x	x	x	X	x	x	x		x
4 Pelaporan						x	X	x	x	x	x	X

## 4.3. Pembiayaan

No.	Mata Anggaran	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>I. Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran Pertanian</b>				
	<b>Total Jumlah</b>			156.400.000
1.	<b>Belanja Bahan</b>			<b>175.000.000</b>
	• Fotocopy	3 Keg	5.000.000,-	<b>15.000.000,-</b>
2.	<b>Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi</b>			<b>18.000.000,-</b>
	• ATK, Jilid, cetak, Porto dan komputer supplies	3 Keg	2.000.000,-	6.000.000,-
	• Biaya Pertemuan penyusunan program, anggaran dan seminar	3 Keg	2.000.000,-	6.000.000,-
	• Bahan Pembantu penyusunan program, anggaran dan seminar	3 Keg	2.000.000,-	6.000.000,-
3.	<b>Belanja perjalanan biasa:</b>			<b>60.000.000,-</b>
	• Perjalanan ke daerah dalam rangka rapat, koordinasi dan monitoring ke 23 kab/kota	30 OP	2.000.000,-	60.000.000,-

4.	<b>Belanja perjalanan Paket meeting Luar Kota</b>			145.000.000,-
	• Penginapan Penyusunan Rencana Kerja RKA-KL sebanyak 5 kali dan koordinasi KSPP	10 OP	6.000.000,-	60.000.000,-
	• Uang harian Penyusunan Rencana Kerja RKA-KL	20 OH	500.000,-	10.000.000,-

---

## II. Dokumentasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan

---

				<b>100.000.000</b>
1.	Belanja Bahan			<b>3.000.000,-</b>
	• Fotocopy	3 Keg	1.000.000,-	3.000.000,-
2.	Honor Output Kegiatan			<b>5.000.000,-</b>
	- Honor operator pengelola aplikasi Monev	10 OB	500.000,-	<b>5.000.000,-</b>
2.	Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi			<b>25.000.000,-</b>
	• ATK, Jilid, cetak, Porto dan komputer supplies	3 Keg	3.300.000,-	10.000.000,-
	• Bahan Pembuatan dan Penyusunan Program	3 Keg	5.000.000,-	15.000.000,-
3.	Belanja perjalanan biasa:			<b>30.000.000,-</b>
	• Perjalanan ke daerah dalam rangka rapat, koordinasi dan monitoring	20 OP	1.500.000,-	30.000.000,-
4.	Belanja perjalanan dinas dalam kota			<b>18.000.000,-</b>
	• Penginapan Penyusunan Rencana Kerja RKA-KL	20 OP	400.000,-	8.000.000,-
	• Uang harian Penyusunan Rencana Kerja RKA-KL	20 OH	500.000,-	10.000.000,-